

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Bersumber pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai analisis kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan selama masa pendaftaran Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, maka dapat ditarik simpulan terdapat upaya nyata dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas pengawasan pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2024. Langkah-langkah seperti pelaksanaan pelatihan, Bimbingan Teknis (Bimtek), rekrutmen jajaran pengawas Pemilu yang ketat, hingga peningkatan kerja sama dengan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) kepiluan dan keterlibatan masyarakat telah dilakukan untuk memperbaiki efektifitas pengawasan serta mencegah terjadinya dugaan pelanggaran maupun sengketa proses Pemilu.

Berbagai aspek pun turut memengaruhi kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, baik secara internal maupun eksternal. Aspek internal seperti pertama, sumber daya manusia, di mana kualitas dan kuantitas pegawai yang bertugas di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dapat memengaruhi kinerja lembaga. Kedua, kapasitas teknis dan teknologi yang memengaruhi efisiensi dan keakuratan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Ketiga, koordinasi internal; tingkat koordinasi antarunit yang berada dalam Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas pencegahan dan pengawasan tahapan pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2024. Apabila satu informasi tidak mengalir dengan baik, jajaran pengawas Pemilu tidak mempunyai pemahaman komprehensif mengenai tahapan pengawasan yang sedang berlangsung. Keempat, kepemimpinan dan manajemen memengaruhi integritas, akuntabilitas, dan daya guna sumber daya yang tersedia di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Kelima, budaya organisasi yang berarti budaya yang tidak mendukung integritas, transparansi, dan akuntabilitas menghambat efektivitas pengawasan.

Sedangkan aspek eksternal yang memengaruhi yakni pertama dukungan pemerintah setempat. Kedua, partisipasi dan keterlibatan masyarakat terhadap pentingnya pengawasan Pemilu juga berpengaruh terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Ketiga, dinamika politik lokal, termasuk kemungkinan intervensi Parpol calon peserta Pemilu, polarisasi politik, dan relasi pengawas Pemilu dengan peserta Pemilu. Keempat, media massa dan opini publik ikut memengaruhi citra dan dukungan masyarakat terhadap Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Kelima, perubahan regulasi Pemilu yang menuntut Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sigap menghadapi terjadinya perubahan regulasi Pemilu secara tiba-tiba.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan agar pertama, disarankan melakukan evaluasi secara berkala terhadap prosedur pelaksanaan pendaftaran Parpol peserta Pemilu. Evaluasi ini urgen untuk mengidentifikasi batu sandungan yang terjadi dan kemudian dicarikan solusinya yang inovatif. Proses pendaftaran Parpol peserta Pemilu, termasuk nanti pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), yang transparan dan akuntabel bakal meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga pengawas; Kedua, penting sekali bagi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui beragam pelatihan. Pelatihan yang diberikan berfokus pada hukum Pemilu, manajemen resiko, dan keterampilan komunikasi. Keberadaan pegawai yang terlatih membuat kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan di lapangan semakin maju dan turut memengaruhi citra positif lembaga ke luar; Ketiga, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugas pengawasan. Penggunaan aplikasi dan platform

komunikasi digital dapat mempermudah interaksi dengan masyarakat dan peserta Pemilu, serta mengakselerasi proses pengawasan. Hal demikian mendukung keterbukaan dan akuntabilitas Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta responsibilitas terhadap aspirasi masyarakat.

2. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas fokus penelitian ke wilayah lain seperti provinsi maupun kabupaten atau kota di Indonesia. Studi komparatif mengenai kinerja Bawaslu di berbagai daerah akan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai tantangan dan praktik baik selama pengawasan Pemilu. Penelitian lanjutan ini tidak hanya akan memberikan wawasan mengenai dinamika lokal, tetapi ikut berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih berdaya guna dalam pengawasan Pemilu. Lebih jauh peneliti ke depan harus mengeksplorasi lebih dalam tentang peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu maupun Pilkada. Adanya keterlibatan masyarakat sebagai objek penelitian nanti dapat memberikan perspektif baru dan memperkaya pemahaman mengenai interaksi lembaga pengawas Pemilu dengan masyarakat. Peneliti dengan memahami peran dari masyarakat dapat pula merumuskan strategi yang lebih inklusif dalam meningkatkan partisipasi publik. Penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan metodologi penelitian yang lebih variatif seperti pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan. Penggunaan dua pendekatan dapat menghasilkan data lebih akurat. Peneliti berharap melalui saran atau rekomendasi ini berbagai penelitian di masa mendatang mampu memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pengawasan Pemilu di Indonesia.